

PENDATAAN PROFIL DAN PETA ADMINISTRASI KAMPUNG NARAMBEN

Evanita V. Manullang^{1*}, Dewi Anggraeni², Westi Setiati³

¹⁻³Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email korespondensi: eva.manullang@gmail.com

Disubmit: 03 Juni 2026

Diterima: 26 Juni 2026

Diterbitkan: 01 Juli 2026

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v9i7.26299>

ABSTRAK

Administrasi kampung membutuhkan data dasar, profil wilayah, dan informasi spasial yang akurat agar pelayanan pemerintahan serta perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah. Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, masih membutuhkan penguatan administrasi melalui pembaruan data, penyusunan profil kampung, dan penyediaan peta administrasi yang mudah digunakan oleh aparat kampung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi pemerintah kampung dalam menata data dasar, menyusun profil kampung, dan menghasilkan peta administrasi sebagai media informasi wilayah. Metode kegiatan menggunakan pendampingan partisipatif melalui koordinasi kebutuhan mitra, koordinasi teknis dengan mahasiswa, pendataan langsung, pengolahan data, penyusunan dokumen profil, pembuatan peta administrasi, validasi, dan serah terima luaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendataan mampu menghimpun informasi dasar kampung secara lebih sistematis, dokumen profil kampung dapat disusun sebagai rujukan informasi pemerintahan, dan peta administrasi membantu penyajian informasi kewilayahan secara visual. Kesimpulannya, pendampingan pendataan, penyusunan profil, dan peta administrasi berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas administrasi Kampung Naramben. Pemerintah kampung disarankan memperbarui data secara berkala dan menggunakan profil serta peta administrasi sebagai dasar pelayanan dan perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Pendataan, Profil Kampung, Peta Administrasi, Tata Kelola Kampung, PKM.

ABSTRACT

Village administration required accurate baseline data, village profiles, and spatial information to support public services and development planning. Naramben Village, Skanto District, Keerom Regency, still needed administrative strengthening through data updating, village profile preparation, and the availability of an administrative map that could be used by village officers. This community service program aimed to assist the village government in organizing baseline data, preparing a village profile, and producing an administrative map as a spatial information medium. The method used participatory assistance through partner needs coordination, technical coordination with students, direct data collection, data processing, profile document preparation, administrative map development, validation, and output handover. The results

showed that data collection organized village information more systematically, the village profile document served as a governmental information reference, and the administrative map presented territorial information visually. In conclusion, assistance in data collection, profile preparation, and administrative mapping contributed to improving the administrative capacity of Naramben Village. The village government was advised to update the data periodically and use the profile and administrative map as a basis for public services and development planning.

Keywords: *Data Collection, Village Profile, Administrative Map, Village Governance, Community Service.*

1. PENDAHULUAN

Kampung sebagai satuan pemerintahan lokal memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, pengelolaan data masyarakat, dan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan warga. Dalam kerangka regulasi pemerintahan desa, desa atau kampung tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai hak asal usul dan kewenangan lokal (Republik Indonesia, 2014). Kewenangan tersebut menuntut pemerintah kampung memiliki data, dokumen, dan informasi dasar yang tertib agar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan komunikasi kelembagaan dapat dilakukan secara akuntabel (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

Penguatan administrasi kampung perlu dipahami sebagai proses membangun sistem informasi dasar yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Administrasi tidak hanya berhubungan dengan arsip surat-menyerut, tetapi juga mencakup penataan data penduduk, pencatatan potensi, dokumentasi sarana prasarana, serta penyajian informasi wilayah. Ketersediaan data yang valid menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan desa berbasis bukti, termasuk dalam agenda pendataan desa berbasis SDGs Desa yang menekankan pentingnya data mikro wilayah sebagai dasar intervensi pembangunan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Kampung Naramben berada di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Berdasarkan laporan lapangan kegiatan KUKERTA, kampung ini memiliki kebutuhan untuk memperbaiki kelengkapan informasi administrasi, memperbarui data dasar kampung, dan menyediakan informasi wilayah yang mudah dipahami oleh aparat kampung maupun masyarakat (Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, 2026). Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa masalah administrasi kampung tidak selalu bersifat kompleks secara teknologi, tetapi sering berawal dari belum tersedianya data yang rapi, profil kampung yang sistematis, dan peta administrasi yang dapat digunakan dalam pelayanan maupun perencanaan.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa peta administrasi, peta profil, dan sistem informasi wilayah dapat membantu pemerintah desa menyajikan informasi secara lebih jelas. Pembuatan peta administrasi di Desa Bligo, Desa Patallasang, dan Desa Teluk Nyatu, misalnya, terbukti menjadi media pendukung pembangunan, pelayanan, dan

komunikasi spasial desa (Rohmadiani et al., 2022; Husain, 2023; Ferdinandus et al., 2023). Pendampingan pembuatan peta profil desa berbasis Sistem Informasi Geografis juga membantu perangkat desa dalam memahami kondisi wilayah, fasilitas umum, jaringan jalan, dan potensi yang perlu dimasukkan dalam dokumen perencanaan (Ilfiyaningrum et al., 2026).

Meskipun demikian, gap kegiatan pengabdian yang menjadi dasar artikel ini terletak pada integrasi antara pendataan kampung, penyusunan profil kampung, dan pembuatan peta administrasi dalam satu paket luaran yang saling terhubung. Banyak kegiatan pemetaan desa berakhir pada produk peta, sedangkan banyak kegiatan administrasi desa berhenti pada pembaruan data tekstual. Kegiatan PKM ini menawarkan kebaruan praktis berupa pendampingan yang menghubungkan data lapangan, dokumen profil, dan peta administrasi sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai basis informasi kampung secara lebih utuh.

Perguruan tinggi dapat berperan dalam menjembatani kebutuhan tersebut melalui program pengabdian berbasis pendampingan. Dosen sebagai pelaksana PKM memiliki kapasitas untuk merancang kegiatan, mengarahkan metode, melakukan validasi data, dan memastikan luaran yang dihasilkan dapat digunakan oleh mitra. Mahasiswa ditempatkan sebagai mitra teknis lapangan yang membantu pendataan dan pengolahan informasi, sedangkan pemerintah kampung menjadi mitra utama yang menyediakan data, memvalidasi informasi, dan memanfaatkan hasil kegiatan.

Tujuan kegiatan PKM ini adalah mendampingi Pemerintah Kampung Naramben dalam melakukan pendataan, menyusun profil kampung, dan membuat peta administrasi kampung. Tujuan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis informasi kampung, meningkatkan kerapian administrasi, menyediakan media visual kewilayahan, dan menghasilkan luaran yang dapat digunakan dalam pelayanan maupun perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan menjadi kontribusi praktis perguruan tinggi terhadap peningkatan tata kelola administrasi kampung.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

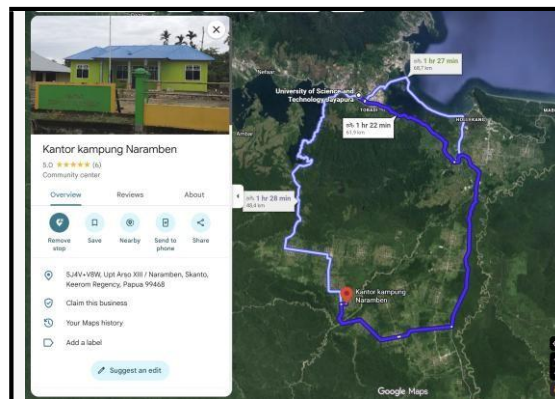
Masalah utama yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya penataan data dasar kampung. Data yang belum tersusun secara sistematis dapat menimbulkan kesulitan ketika aparat kampung membutuhkan informasi untuk pelayanan, penyusunan rencana kegiatan, komunikasi dengan pihak luar, atau pembaruan dokumen pemerintahan. Dalam administrasi pemerintahan desa, ketersediaan data yang tertib merupakan bagian dari tata kelola pelayanan dan perencanaan pembangunan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Masalah kedua adalah dokumen profil kampung belum tersusun sebagai dokumen informasi yang mudah digunakan. Profil kampung seharusnya memuat informasi identitas kampung, kondisi geografis, data penduduk, potensi wilayah, sarana prasarana, dan informasi pendukung lainnya. Profil yang baik membantu pemerintah kampung menyajikan informasi dasar secara ringkas, terstruktur, dan mudah diperbarui. Kegiatan pembuatan profil desa dalam berbagai pengabdian menunjukkan bahwa profil desa dapat menjadi pintu masuk penguatan informasi dan promosi potensi wilayah (Nugroho & Daniati, 2021; Al Zahra et al., 2023).

Masalah ketiga adalah belum tersedianya peta administrasi kampung sebagai media informasi wilayah. Peta administrasi memiliki fungsi penting karena menyajikan informasi spasial secara ringkas, membantu pengguna memahami posisi wilayah, dan mendukung komunikasi pembangunan berbasis lokasi. Kegiatan pemetaan desa di beberapa wilayah menunjukkan bahwa peta administrasi dapat membantu pemerintah desa memahami batas, sebaran fasilitas, akses, dan orientasi wilayah (Rohmadiani et al., 2022; Ferdinandus et al., 2023; Syamsiar, 2024).

Berdasarkan masalah tersebut, kegiatan PKM ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian/pengabdian. Pertama, bagaimana kondisi kebutuhan administrasi Kampung Naramben terkait pendataan, penyusunan profil kampung, dan pembuatan peta administrasi? Kedua, bagaimana proses pendampingan pendataan, penyusunan profil kampung, dan pembuatan peta administrasi dilaksanakan bersama pemerintah kampung dan mahasiswa sebagai mitra teknis? Ketiga, bagaimana luaran pendataan, profil kampung, dan peta administrasi dapat mendukung tata kelola administrasi Kampung Naramben?

Tujuan kegiatan ini disusun sesuai dengan rumusan pertanyaan tersebut, yaitu mengidentifikasi kebutuhan administrasi Kampung Naramben, mendampingi proses pendataan serta penyusunan profil dan peta administrasi, dan menjelaskan manfaat luaran PKM bagi penguatan tata kelola administrasi kampung. Lokasi kegiatan adalah Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Penyajian peta lokasi dalam artikel ini dimaksudkan untuk menunjukkan konteks spasial kegiatan dan memperjelas hubungan antara pendataan, profil kampung, dan peta administrasi yang menjadi fokus PKM.



Gambar 1. Peta lokasi kegiatan PKM di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom

3. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi desa atau kampung merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan lokal yang menuntut keteraturan data, dokumen, dan informasi pelayanan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal (Republik Indonesia, 2014). Dalam pelaksanaannya, administrasi pemerintahan desa mencakup pencatatan data, dokumen, dan informasi

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu, kualitas administrasi desa sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia.

Data dasar kampung memiliki fungsi strategis sebagai basis pengambilan keputusan. Konsep perencanaan berbasis data menekankan bahwa program pembangunan seharusnya dirancang berdasarkan bukti, kondisi lapangan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desa atau kampung, data dasar yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, sarana prasarana, dan potensi wilayah menjadi komponen penting untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Kegiatan pengabdian yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan data desa juga menunjukkan bahwa data yang tertata dapat mempercepat pelayanan dan memperkuat perencanaan pembangunan (Hartati et al., 2024; Sari et al., 2026).

Profil kampung dapat dipahami sebagai dokumen informasi terstruktur yang menggambarkan identitas dan kondisi kampung. Dokumen ini penting karena menjadi jembatan antara data mentah dan kebutuhan komunikasi kelembagaan. Profil kampung membantu aparat menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah, lembaga mitra, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang

membutuhkan gambaran umum tentang kampung. Pembuatan website atau dokumen profil desa dalam sejumlah kegiatan pengabdian memperlihatkan bahwa profil desa mampu meningkatkan akses informasi, transparansi, dan promosi potensi lokal (Nugroho & Daniati, 2021; Al Zahra et al., 2023; Amnah et al., 2023).

Peta administrasi merupakan representasi visual mengenai wilayah administratif. Dalam tata kelola kampung, peta memiliki nilai praktis karena menyajikan informasi ruang dalam bentuk yang mudah dipahami. Pemetaan wilayah dapat membantu identifikasi batas, posisi fasilitas, jaringan akses, serta orientasi lokasi. Kegiatan pembuatan peta administrasi di berbagai desa menunjukkan bahwa peta dapat menjadi media pendukung pembangunan daerah, penguatan informasi desa, dan penyusunan rencana kerja berbasis wilayah (Rohmadiani et al., 2022; Lestari et al., 2020; Luis et al., 2021; Husain, 2023; Ferdinandus et al., 2023; Syamsiar, 2024).

Pendampingan peta profil desa berbasis SIG memperlihatkan bahwa peta tidak sekadar produk visual, tetapi dapat menjadi instrumen perencanaan ketika memuat data kontur, jaringan jalan, fasilitas umum, permukiman, dan peruntukan lahan (Ilfiyaningrum et al., 2026). Pemetaan potensi desa berbasis SIG dalam kegiatan KKN juga menegaskan bahwa data spasial membantu kampung membaca potensi dan masalah wilayah secara lebih terstruktur (Wardani et al., 2026). Dengan demikian, peta administrasi dalam PKM ini ditempatkan sebagai bagian dari sistem informasi dasar kampung, bukan sebagai gambar pelengkap semata.

Pendekatan partisipatif relevan digunakan karena pemerintah kampung memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi wilayah, data penduduk, fasilitas, dan sejarah perkembangan kampung. Pemetaan pemukiman pesisir berbasis partisipatif menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat membantu proses identifikasi lokasi dan meningkatkan manfaat peta bagi warga (Koroy et al., 2025). Pendampingan pemetaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum berbasis SIG juga menunjukkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan lokal dapat membantu memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Syafi'i et al., 2025).

Pendampingan administrasi desa juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur. Kegiatan penguatan kapasitas administrasi desa menekankan pentingnya ketersediaan data administrasi, keterampilan pengelolaan dokumen, dan alur kerja yang jelas (Hartati et al., 2024; Islam et al., 2025). Pelatihan pelayanan administrasi desa dan digitalisasi administrasi menunjukkan bahwa data yang rapi menjadi prasyarat sebelum desa mengembangkan sistem informasi atau layanan digital (Agarina et al., 2024; Mardinata et al., 2023). Artinya, pendataan dan penyusunan profil kampung merupakan fondasi sebelum kampung masuk pada tahapan digitalisasi yang lebih kompleks.

Kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa penguatan administrasi kampung perlu dilakukan melalui integrasi data tekstual dan data spasial. Data tekstual diperlukan untuk menyusun profil, sedangkan data spasial diperlukan untuk menyusun peta administrasi. Sintesis dari berbagai studi dan kegiatan pengabdian menegaskan bahwa kontribusi utama PKM ini terletak pada pendampingan terintegrasi yang menghasilkan data dasar, profil kampung, dan peta administrasi sebagai satu paket informasi untuk mendukung tata kelola Kampung Naramben.

Signifikansi kegiatan ini juga terletak pada konteks wilayah Papua yang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan informasi dasar kampung. Ketersediaan profil dan peta administrasi dapat membantu pemerintah kampung

menampilkan identitas wilayahnya secara lebih komunikatif. Kontribusi artikel ini adalah menunjukkan bahwa PKM dosen dapat diarahkan pada penguatan tata kelola kampung melalui produksi informasi administrasi dan spasial yang sederhana, murah, dan langsung digunakan oleh mitra.

Konsep rencana program dalam PKM ini mengikuti alur input, proses, dan luaran. Input kegiatan berupa kebutuhan administrasi mitra, data lapangan, pengetahuan lokal aparat kampung, dan dukungan mahasiswa sebagai mitra teknis. Proses kegiatan mencakup koordinasi, pendataan, verifikasi, pengolahan data, penyusunan profil, pembuatan peta, serta validasi bersama mitra. Luaran kegiatan berupa data dasar yang lebih tertata, dokumen profil kampung, dan peta administrasi. Alur ini penting karena setiap luaran disusun berdasarkan kebutuhan mitra dan dikonfirmasi kembali kepada pemerintah kampung sebelum diserahkan.

Landasan konseptual lain yang relevan adalah tata kelola berbasis data. Dalam konteks pemerintahan kampung, data bukan hanya kumpulan angka, tetapi bahan kerja kelembagaan yang menghubungkan kebutuhan warga, kapasitas aparatur, dan prioritas pembangunan. Data yang tidak tertata dapat menyebabkan kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran, sedangkan data yang telah diklasifikasikan ke dalam profil kampung dapat menjadi dasar argumentasi ketika pemerintah kampung menyusun usulan program, menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah daerah, atau menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal. Oleh karena itu, pendataan dalam kegiatan ini diposisikan sebagai tahap awal penguatan administrasi, bukan sekadar aktivitas pengisian formulir.

4. METODE

Metode pelaksanaan PKM menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif. Pendampingan dipilih karena masalah mitra berkaitan dengan kebutuhan penguatan administrasi, bukan sekadar penyampaian materi. Pendekatan partisipatif memungkinkan dosen, mahasiswa, dan pemerintah kampung bekerja bersama dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menyusun luaran, dan melakukan validasi hasil. Model ini sejalan dengan kegiatan pemetaan dan penguatan administrasi desa yang menempatkan mitra sebagai pengguna sekaligus validator hasil (Kasim et al., 2022; Ilfiyaningrum et al., 2026; Koroy et al., 2025; Syafi'i et al., 2025).

Kegiatan dilaksanakan di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Mitra utama kegiatan adalah Pemerintah Kampung Naramben, sedangkan mahasiswa KUKERTA Kelompok 7 dilibatkan sebagai mitra teknis lapangan. Peserta langsung kegiatan terdiri atas tiga dosen pelaksana, mahasiswa sebagai pendukung pendataan dan pengolahan data lapangan, aparat kampung sebagai informan kunci dan pengguna luaran, serta warga yang memberikan informasi pada saat pendataan. Informan dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan terkait administrasi, wilayah, fasilitas, dan kebutuhan kampung.

Jumlah peserta yang terlibat secara langsung dalam kegiatan inti terdiri atas tiga dosen pelaksana, mahasiswa KUKERTA Kelompok 7 sebagai mitra teknis, aparat Kampung Naramben sebagai mitra utama dan informan kunci, serta warga yang memberikan informasi saat pendataan lapangan. Peserta tidak dipilih melalui teknik sampling statistik karena kegiatan ini merupakan pengabdian berbasis pendampingan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu mengutamakan pihak yang mengetahui kondisi administrasi, kewilayahan, fasilitas, dan kebutuhan data kampung.

Tahap pertama adalah koordinasi awal dengan pihak kampung. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan utama mitra, menentukan ruang lingkup kegiatan, dan menyepakati luaran yang akan disiapkan. Pada tahap ini, tim dosen mendiskusikan persoalan pendataan, kebutuhan profil kampung, dan bentuk peta administrasi yang diharapkan. Hasil koordinasi menjadi dasar penyusunan rencana kerja, pembagian peran, dan penyusunan instrumen pendataan.

Tahap kedua adalah koordinasi teknis dengan mahasiswa. Pada tahap ini, dosen menjelaskan data yang perlu dikumpulkan, metode pengambilan data, format pencatatan, serta etika berinteraksi dengan aparat dan warga. Data yang dibutuhkan meliputi identitas kampung, informasi umum, kondisi penduduk, fasilitas, potensi, akses, dan informasi kewilayahan yang relevan untuk peta administrasi. Koordinasi teknis penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang sama dan tidak mengumpulkan data secara acak.

Tahap ketiga adalah pendataan langsung. Tim dosen bersama mahasiswa turun ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara singkat, pencatatan, dan verifikasi informasi. Pendataan tidak hanya dilakukan dengan mencatat informasi, tetapi juga dengan memeriksa kesesuaian data melalui komunikasi dengan pihak kampung. Teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan verifikasi lapangan digunakan untuk meningkatkan keabsahan data kegiatan. Kriteria inklusi data adalah informasi yang berkaitan langsung dengan profil kampung dan peta administrasi, sedangkan data yang tidak relevan dengan luaran tidak

dimasukkan dalam analisis.

Tahap keempat adalah pengolahan data dan penyusunan profil kampung. Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan sesuai tema, kemudian disusun menjadi narasi profil yang memuat informasi identitas kampung, kondisi umum, potensi, dan fasilitas. Penyusunan profil dilakukan dengan memperhatikan kejelasan bahasa, kerapian struktur, serta manfaat dokumen bagi aparat kampung. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, kategorisasi, penyajian informasi, dan penarikan simpulan kegiatan.

Tahap kelima adalah pembuatan peta administrasi kampung. Peta disusun berdasarkan informasi wilayah yang diperoleh melalui observasi, koordinasi dengan aparat kampung, dokumentasi lapangan, dan data pendukung yang tersedia. Penyusunan peta dilakukan untuk menampilkan informasi ruang secara sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Tahap keenam adalah validasi dan serah terima hasil. Validasi dilakukan melalui pemeriksaan kembali isi profil dan peta bersama pihak kampung agar luaran tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga diterima dan sesuai dengan kebutuhan mitra.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan PKM

Tahap	Kegiatan	Pihak Terlibat	Luaran
1	Koordinasi kebutuhan mitra dan penyepakatan fokus PKM	Tim dosen dan aparatur kampung	Daftar kebutuhan data, profil, dan peta
2	Koordinasi teknis jenis data, metode pengambilan data, dan pembagian tugas lapangan	Tim dosen dan mahasiswa	Instrumen pendataan dan alur kerja
3	Observasi dan pendataan langsung di wilayah kampung	Tim dosen, mahasiswa, aparatur kampung, warga informan	Data dasar dan catatan spasial kampung
4	Pengolahan data, penyusunan profil, dan penyusunan peta administrasi	Tim dosen dan mahasiswa	Draf profil kampung dan peta administrasi
5	Validasi, perbaikan, finalisasi, dan serah terima luaran	Tim dosen dan pemerintah kampung	Profil kampung dan peta administrasi siap digunakan

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Hasil kegiatan disajikan sesuai dengan urutan rumusan pertanyaan dan tujuan kegiatan. Penyajian ini dimaksudkan agar hasil tidak hanya berupa deskripsi kegiatan, tetapi menjawab kebutuhan yang telah dirumuskan sejak awal. Secara umum, kegiatan menghasilkan tiga

capaian utama, yaitu teridentifikasinya kebutuhan administrasi kampung, terlaksananya pendampingan pendataan dan penyusunan luaran, serta tersedianya profil kampung dan peta administrasi sebagai dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh mitra.

Hasil pertama berkaitan dengan kondisi kebutuhan administrasi Kampung Naramben. Dari koordinasi awal dengan pihak kampung, diperoleh informasi bahwa pemerintah kampung membutuhkan data yang lebih tertata, profil kampung yang dapat digunakan sebagai dokumen informasi, dan peta administrasi yang dapat membantu penyajian informasi wilayah. Kondisi ini sejalan dengan temuan awal dalam laporan kegiatan lapangan di Kampung Naramben yang menunjukkan kebutuhan penguatan administrasi dan penyediaan informasi dasar kampung (Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, 2026).

Koordinasi awal menghasilkan kesepakatan bahwa kegiatan PKM difokuskan pada luaran yang bersifat administratif dan spasial. Fokus tersebut berbeda dengan kegiatan PKM yang hanya menekankan penyuluhan satu arah. Dalam kegiatan ini, mitra tidak hanya menerima materi, tetapi terlibat dalam menentukan kebutuhan, memberikan informasi, dan memvalidasi hasil. Pola demikian sesuai dengan prinsip pendampingan desa karena mitra ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kebutuhan dan pengetahuan lokal.



Gambar 2. Koordinasi awal dengan pemerintah kampung dan koordinasi teknis dengan mahasiswa

Hasil kedua berkaitan dengan proses pendampingan pendataan, penyusunan profil, dan pembuatan peta. Pendataan dilakukan secara langsung melalui observasi dan komunikasi dengan pihak kampung. Tim dosen ikut turun ke lapangan untuk memastikan proses pendataan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan bahan yang relevan untuk penyusunan profil kampung. Proses ini mengacu pada temuan lapangan dalam laporan KUKERTA serta prinsip pengumpulan data yang menekankan observasi, pencatatan, dokumentasi, dan validasi informasi (Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, 2026).

Pendataan lapangan menghasilkan bahan utama penyusunan profil kampung. Data yang telah dihimpun diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, seperti identitas kampung, kondisi umum, informasi penduduk, sarana dan prasarana, potensi, serta catatan kewilayahan. Pengelompokan ini memudahkan penyusunan profil karena setiap informasi ditempatkan pada bagian yang sesuai.

Profil kampung kemudian disusun sebagai dokumen naratif yang lebih mudah dibaca dibandingkan catatan mentah. Dengan demikian, kegiatan ini menghasilkan transformasi dari data lapangan menjadi informasi administrasi yang dapat digunakan.

Pembuatan peta administrasi dilakukan secara bertahap. Tahapan ini membutuhkan koordinasi progres karena peta tidak hanya harus menunjukkan tampilan yang rapi, tetapi juga harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Informasi spasial yang disajikan dalam peta harus mudah dibaca, sesuai dengan pemahaman lokal, dan mendukung pelayanan administrasi. Oleh sebab itu, proses penyusunan peta memerlukan keseimbangan antara aspek teknis, visual, dan partisipatif. Praktik tersebut sejalan dengan kegiatan pemetaan wilayah desa lain yang menekankan pengambilan data langsung dan validasi dengan aparat desa (Ferdinandus et al., 2023; Ilfiyaningrum et al., 2026; Syafi'i et al., 2025).



Gambar 3. Pendataan langsung dan koordinasi progres penyusunan peta administrasi

Hasil ketiga berkaitan dengan luaran dan manfaat kegiatan. Luaran utama berupa data dasar kampung, dokumen profil Kampung Naramben, dan peta administrasi kampung. Ketiga luaran tersebut saling berkaitan. Data dasar menjadi bahan utama profil, profil menjadi dokumen informasi, dan peta administrasi menjadi representasi visual wilayah. Integrasi data, dokumen, dan informasi spasial mendukung praktik perencanaan dan pelayanan berbasis data. Dokumen profil kampung memberi manfaat bagi aparat kampung dalam menyampaikan informasi kepada pihak eksternal. Profil dapat digunakan saat kampung menerima kunjungan, menyusun usulan kegiatan, atau menjelaskan kondisi kampung kepada lembaga mitra. Manfaat lainnya adalah membantu aparat kampung melihat kembali data dasar yang dimiliki. Ketika profil tersedia, pemerintah kampung memiliki dokumen awal yang dapat diperbarui secara berkala. Dengan demikian, profil tidak hanya menjadi luaran satu kali, tetapi dapat menjadi dokumen hidup apabila dikelola oleh kampung.

Peta administrasi memberikan manfaat dalam penyajian informasi wilayah. Bagi kampung yang sedang memperkuat administrasi, peta dapat membantu menjelaskan hubungan antar lokasi, posisi fasilitas, akses wilayah, dan batas administrasi. Peta juga dapat digunakan sebagai media komunikasi ketika pemerintah kampung berinteraksi dengan pihak luar. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian yang

menunjukkan bahwa peta administrasi dan peta profil desa dapat membantu perencanaan pembangunan, identifikasi fasilitas, dan komunikasi potensi wilayah (Rohmadiani et al., 2022; Husain, 2023; Ilfiyaningrum et al., 2026; Wardani et al., 2026).

Serah terima hasil PKM menjadi tahap penting karena menandai bahwa luaran telah diterima oleh mitra. Kegiatan serah terima bukan hanya kegiatan formal, tetapi juga bentuk akuntabilitas bahwa proses pendataan, penyusunan profil, dan peta administrasi telah menghasilkan produk yang dapat digunakan. Pada tahap ini, tim dosen menjelaskan isi luaran dan mendorong pihak kampung untuk melakukan pembaruan data secara berkala. Pembaruan tersebut penting karena data kampung bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan penduduk, fasilitas, dan kebutuhan pembangunan.



Gambar 4. Serah terima hasil PKM berupa profil kampung dan peta administrasi kepada pihak kampung

Tabel 2. Keterkaitan rumusan pertanyaan, proses kegiatan, dan luaran PKM

Rumusan Pertanyaan	Proses Kegiatan	Luaran	Manfaat bagi Mitra
Kebutuhan administrasi kampung	Koordinasi awalDaftar dan identifikasikebutuhan data, kebutuhan data profil, dan peta		Mitra memahami prioritas penguatan administrasi
Proses pendampingan	Koordinasi teknis, pendataan, pengolahan data, dan validasi	Data dasar dan draf profil kampung	Data kampung tersusun lebih sistematis
Manfaat luaran	Finalisasi profil dan peta administrasi serta serah terima	Profil kampung dan peta administrasi	Mendukung pelayanan, komunikasi, dan perencanaan berbasis data

b. Pembahasan

Dalam pembahasan, kegiatan ini dapat dibandingkan dengan pendekatan PKM yang berbasis penyuluhan. Pada kegiatan penyuluhan, luaran sering berupa peningkatan pengetahuan peserta dalam waktu singkat. Pada kegiatan ini, luaran berbentuk data, dokumen, dan peta yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PKM berbasis pendampingan dapat menghasilkan perubahan kelembagaan yang lebih konkret karena mitra dilibatkan dalam proses kerja dan memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan.

Jika dibandingkan dengan konsep pemberdayaan administrasi desa, kegiatan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu berbentuk pelatihan ekonomi atau peningkatan keterampilan produksi. Pemberdayaan juga dapat berupa peningkatan kapasitas administrasi, ketersediaan informasi, dan kemampuan kelembagaan dalam menggunakan data. Pemerintah kampung yang memiliki data dasar, profil, dan peta administrasi akan lebih siap menyusun program, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan menjelaskan kebutuhan wilayahnya.

Dibandingkan dengan kegiatan pemetaan murni yang berorientasi teknis, kegiatan ini menggabungkan pemetaan dengan pendataan dan penyusunan profil. Peta administrasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari paket informasi kampung. Hal ini penting karena peta yang baik tidak hanya akurat secara visual, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan data sosial, administrasi, dan kebutuhan pengguna. Prinsip pemetaan partisipatif menegaskan bahwa informasi spasial akan lebih bermanfaat apabila dikaitkan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat (Koroy et al., 2025; Syafii et al., 2025).

Kegiatan ini juga menunjukkan perbedaan antara data mentah dan informasi yang siap digunakan. Data mentah yang dikumpulkan dari lapangan belum tentu langsung bermanfaat apabila tidak diolah. Setelah data diklasifikasikan, diverifikasi, dan disusun menjadi profil kampung, nilainya meningkat menjadi informasi yang dapat digunakan. Proses ini penting karena banyak masalah administrasi desa bukan hanya kekurangan data, tetapi juga ketiadaan mekanisme untuk mengubah data menjadi dokumen kerja yang mudah dimanfaatkan oleh aparat kampung.

Dari sisi metode, pendampingan partisipatif terbukti lebih sesuai dibandingkan metode kerja tertutup. Apabila tim menyusun profil dan peta tanpa koordinasi dengan kampung, hasilnya berisiko tidak sesuai kebutuhan mitra. Sebaliknya, ketika mitra dilibatkan sejak awal, hasil yang disusun lebih mudah diterima karena sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prinsip partisipasi meningkatkan relevansi, rasa memiliki, dan peluang keberlanjutan hasil kegiatan.

Keterlibatan mahasiswa sebagai mitra teknis memiliki kontribusi terhadap efisiensi kegiatan. Mahasiswa membantu mengumpulkan data, mencatat temuan, mendokumentasikan kegiatan, dan mendukung pengolahan informasi. Namun, peran dosen tetap menjadi unsur utama karena dosen merancang metode, mengarahkan prosedur, mengontrol kualitas data, dan memastikan luaran sesuai tujuan PKM. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa PKM dapat menjadi ruang pembelajaran lapangan sekaligus ruang produksi luaran akademik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dampak langsung kegiatan terlihat pada tersedianya bahan administrasi kampung yang lebih tertata. Dampak jangka panjangnya bergantung pada keberlanjutan penggunaan luaran oleh pihak kampung. Jika profil dan peta diperbarui secara berkala, keduanya dapat menjadi instrumen penting bagi perencanaan kampung, pengajuan program, dan komunikasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan gagasan pembangunan desa berbasis data yang menuntut pembaruan data secara berkala dan pemanfaatan data dalam perencanaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020; Sari et al., 2026).

Sintesis dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendataan, profil, dan peta administrasi membentuk satu siklus informasi. Pendataan menghasilkan bahan mentah, penyusunan profil mengubah bahan mentah menjadi informasi naratif, sedangkan peta administrasi mengubah informasi wilayah menjadi bentuk visual. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi dasar bagi penguatan tata kelola kampung. Oleh karena itu, keberhasilan PKM tidak hanya diukur dari tersedianya dokumen, tetapi dari kesesuaian dokumen dengan kebutuhan mitra dan peluang pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga dapat dikontraskan dengan kegiatan pemetaan yang hanya menekankan akurasi teknis peta. Dalam PKM ini, peta administrasi tidak diperlakukan sebagai produk teknis yang terpisah dari kebutuhan administrasi, tetapi sebagai bagian dari paket informasi kampung. Nilai peta tidak hanya terletak pada tampilannya, melainkan pada kemampuannya menjelaskan informasi wilayah kepada aparat kampung, masyarakat, dan pihak luar. Dengan menghubungkan peta dengan profil kampung, informasi spasial menjadi lebih bermakna karena dapat dibaca bersama data sosial, fasilitas, dan kebutuhan pembangunan.

Apabila dibandingkan dengan program penguatan administrasi berbasis aplikasi, kegiatan ini masih berada pada tahap dasar karena belum membangun sistem informasi digital. Namun, justru pada titik inilah kegiatan ini memiliki relevansi praktis. Kampung yang belum memiliki data tertata membutuhkan fondasi data dan dokumen lebih dahulu sebelum masuk pada tahap digitalisasi. Tanpa data dasar dan profil yang valid, penerapan aplikasi administrasi berisiko hanya memindahkan data yang belum rapi ke media digital. Dengan demikian, kegiatan ini dapat diposisikan sebagai prasyarat menuju pengembangan sistem informasi kampung yang lebih lengkap.

Keterbatasan kegiatan ini terletak pada ruang lingkup luaran yang masih difokuskan pada data dasar, profil, dan peta administrasi. Kegiatan belum membangun sistem informasi digital yang dapat diperbarui secara mandiri oleh aparat kampung. Karena itu, pengembangan lanjutan dapat diarahkan pada pelatihan pembaruan data, penyimpanan digital, dan sistem informasi kampung sederhana. Pengembangan tersebut penting agar luaran peta dan profil tidak berhenti sebagai dokumen statis, tetapi berkembang menjadi basis informasi kampung yang berkelanjutan.

6. KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini menjawab tiga rumusan pertanyaan. Pertama, kebutuhan administrasi Kampung Naramben berkaitan dengan penataan data dasar, penyusunan profil kampung, dan penyediaan peta administrasi.

Kedua, proses pendampingan dilakukan melalui koordinasi awal, koordinasi teknis dengan mahasiswa, pendataan lapangan, pengolahan data, penyusunan profil, pembuatan peta, validasi, dan serah terima hasil. Ketiga, luaran kegiatan berupa data dasar, profil kampung, dan peta administrasi memberikan manfaat bagi pemerintah kampung dalam penyajian informasi, pelayanan administrasi, dan perencanaan berbasis data.

Dengan demikian, pendataan, penyusunan profil, dan pembuatan peta administrasi merupakan bentuk PKM yang relevan untuk memperkuat kapasitas administrasi kampung. Kegiatan ini memberikan kontribusi praktis melalui tersedianya luaran yang dapat langsung digunakan oleh mitra, serta kontribusi akademik melalui model pendampingan yang mengintegrasikan data lapangan, dokumen profil, dan informasi spasial.

Saran untuk Pemerintah Kampung Naramben adalah melakukan pembaruan data secara berkala, menyimpan dokumen profil dan peta administrasi dalam bentuk cetak maupun digital, serta menggunakan luaran kegiatan sebagai bahan pendukung dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan kampung. Saran untuk kegiatan PKM berikutnya adalah melanjutkan pendampingan ke tahap digitalisasi data kampung, pelatihan pengelolaan peta sederhana, dan pengembangan sistem informasi kampung agar profil serta peta administrasi dapat diperbarui secara mandiri oleh aparat kampung.

Rekomendasi lanjutan dari kegiatan ini adalah pemerintah kampung perlu menetapkan mekanisme pembaruan data minimal satu kali dalam satu tahun, menyimpan dokumen profil dan peta dalam bentuk cetak serta digital, dan menunjuk aparatur yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan data. Perguruan tinggi juga dapat melanjutkan kegiatan ini melalui pelatihan pengelolaan data, pendampingan pembaruan peta, dan pengembangan sistem informasi kampung sederhana agar luaran PKM dapat berkembang menjadi instrumen tata kelola yang berkelanjutan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansah, A., Nofriyandi, N., Nasution, A. H., Fadillah, M., Anggaraini, D., Nurhalimah, S., Loska, F., & Septiawan, A. (2021). Penerapan sistem informasi desa menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1472-1479. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5621>
- Agarina, M., Sutedi, S., & Karim, A. (2024). Pelatihan peningkatan pelayanan administrasi desa berbasis pengelolaan dokumen elektronik. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/view/1323>
- Al Zahra, P. N., Maulida, N. K., Rahmawassti, N. E., Arifin, A. F., Audin, B. N. M., & Susetyo, A. M. (2023). Pelatihan dan pembuatan website profil Desa Karanglo Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 38-45. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2089>
- Amnah, A., Fitriani, D., Hidayat, R., & Sari, M. (2023). Pengembangan website desa dalam peningkatan informasi dan transparansi administrasi desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri*, 2(2). <https://tapisberseri.ubl.ac.id/index.php/jpmtapisberseri/article/view>

/66

- Ferdinandus, F., Novalisae, N., Putrawiyanta, I. P., Noveriady, Fidayanti, N., Virgiyanti, L., & Munthe, M. R. (2023). Pemetaan wilayah administrasi Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 643-652. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2579>
- Hartati, D. A., Ramadhan, A., & Mulyadi, S. (2024). Penguatan kapasitas administrasi pemerintah desa melalui pendampingan pengelolaan data dan dokumen. *Monsuan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/monsuan/article/view/3392>
- Husain, F. (2023). Pengadaan peta administrasi Desa Patallasang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 4(2). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/30230>
- Ilfiyaningrum, A., Sutopo, Y., Budiwirawan, A., Nuraida, N., Hermawan, I. A., Andini, L. N. S., & Saputri, P. E. N. (2026). Pendampingan pembuatan peta profil desa berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Desa Medono. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 6(3), 1941-1950. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2829>
- Islam, I. N., Hasanah, R., & Lestari, D. (2025). Peningkatan efisiensi administrasi desa melalui pelatihan pengelolaan dokumen digital. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(1), 114-123.
- Kasim, M. R., Burhanuddin, M. A., Arifin, F. A., Nurana, S., Padhila, N. I., Gaffar, A. W. M., & Bakhri, S. (2022). Pendampingan pemetaan potensi desa di Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 6(2), 428-436. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i2.17507>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Panduan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>
- Koroy, K., Nurafni, N., Naim, A., Mahasari, F., & Umafagur, F. (2025). Pemetaan pemukiman pesisir berbasis partisipatif masyarakat di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i4.1783>
- Lestari, S. A. P., Susanti, F., Kurniawan, A., & Ridha, R. (2020). Penyusunan peta administrasi dan fasilitas berbasis masyarakat di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. *Sinergi: Jurnal Pengabdian*, 2(1), 22-26.
- Luis, R. R. A., Dharmawan, M. O., & Priyono, P. (2021). Penyusunan peta desa dalam kegiatan pengabdian masyarakat hibah peta di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Abdi Geomedisains*, 1(1), 1-8.
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (SID): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *PARTA: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1).
- Nugroho, A., & Daniati, E. (2021). Pelatihan penggunaan website sebagai media informasi profil desa. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v2i1.38>
- Rahmawati, A. D., & Fatmawati, A. (2020). Sistem administrasi Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi berbasis web. *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, 20(2), 149-155. <https://doi.org/10.23917/emitor.v20i02.9893>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Rohmadiani, L. D., Setiawan, M., Wibowo, A. A. A., Triasningrum, A. B., & Salsabila, S. N. R. (2022). Pembuatan peta administrasi sebagai pendukung pembangunan daerah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 2(2), 155-160. <https://abdira.org/index.php/abdira/article/view/113>
- Sari, T. U. M., Hidayat, R., Lestari, D., & Prabowo, A. (2026). Optimalisasi data desa melalui program KKN: Penyusunan basis data dan informasi desa. *Sumbangsih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://digamed.net/index.php/sumbangsih/article/view/609>
- Syafi'i, A. A., Noor, R. H., & Noor, I. (2025). Pendampingan pemetaan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis SIG di Kelurahan Banua Anyar Banjarmasin. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(2), 76-87. <https://doi.org/10.59025/pxwc0v68>
- Syamsiar, N. R. (2024). Kegiatan penyusunan peta administrasi sebagai media informasi wilayah desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 6(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JPMT/article/view/24213>
- Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. (2026). Laporan akhir pelaksanaan KUKERTA Kelompok 7 di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. LPPM USTJ.
- Wardani, Y. K., Pratiwi, S., Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2026). Pemetaan potensi desa berbasis SIG melalui Kuliah Kerja Nyata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(3), 981-987.